
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS *ECOLITERACY*: UPAYA REKONSTRUKSI KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS

W.S. Rondli¹, Yuli Khoirinnida²

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus

²Guru Sekolah Dasar Negeri Ringinkidul UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug

Abstrak

Kecenderungan global membawa dampak pada kerusakan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian sangat serius oleh masyarakat dunia baik dari kalangan akademika maupun luar akademika. Salah satu hasil dari *Earth Summit* adalah merekomendasikan untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) pada abad ke-21 melalui penyelenggaraan pendidikan yang diintegrasikan dengan permasalahan lingkungan hidup atau pendidikan berbasis lingkungan hidup. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Ecoliteracy* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, menanamkan pengetahuan serta membuat pola-pola baru perilaku individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai upaya rekonstruksi Kewarganegaraan Ekologis yang memandang etika lingkungan mampu memberikan pencerahan kepada warganegara yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : PKn, *Ecoliteracy*, dan Kewarganegaraan Ekologis

Abstract

Global trends have an impact on the environmental destruction now become a very serious concern by the world community from both academia and outside academia. One of the outcomes of the Earth Summit is recommending to the implementation of sustainable development (sustainable development) in the 21st century by providing education that is integrated with environmental issues or environment-based education. Based Ecoliteracy Citizenship Education Learning aims to raise awareness, impart knowledge and create new patterns of behavior of individuals, groups and society as a whole towards the environment. This is done as Ecological Citizenship reconstruction effort that sees environmental ethics is able to provide enlightenment to the citizens responsible for the preservation of the environment.

Keywords: Civics, *Ecoliteracy* and Ecological Citizenship

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi membawa arah pada kecenderungan global, menurut Aziz Wahab (2006:63) Kecenderungan global meliputi: “*The global economy, technology and communication, and population and environment*”. Lingkungan dan populasi merupakan salah satu isu global yang mendapatkan perhatian masyarakat dunia. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari kemajuan industri yang konsekuensi logisnya melakukan eksploitasi terhadap lingkungan secara berlebihan serta tidak memikirkan keberlangsungan ekosistemnya. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa upaya pelestariannya mengakibatkan hilangnya ribuan spesies di bumi. Analisis *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) (*The Red List IUCN*, 2010) mengingatkan ada 15.589 spesies binatang dan tumbuhan terancam punah. Sudah ada 844 mengalami kepunahan sejak tahun 1500; 129 catatan mengenai kepunahan spesies burung, 103 diantaranya terjadi sejak tahun 1800. Selain itu, laju kepunahan telah mencapai angka 100 hingga 1.000 kali dari laju kepunahan alami. Spesies hewan yang terancam punah meningkat dari angka 5.204 jenis menjadi 7.266 jenis sejak tahun 1996. Sedangkan untuk jenis tumbuhan dan lumut, ada 8.323 jenis yang nyaris punah dari angka sekitar 3.000 jenis sebelumnya.

Kecenderungan global populasi dan lingkungan menjadi perhatian sangat serius oleh kalangan akademik maupun luar akademik, misalnya sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan ini, muncul gerakan *environmentalism* untuk melindungi lingkungan dari berbagai kerusakan (Kalidjernih, 2007). Selain itu

gagasan untuk gerakan kepedulian terhadap lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat melahirkan paradigma *ecoliteracy* (F. Capra:1995; D. W Orr: 1992; Palmer: 2003; dan Michael and Z. Barlow: 2005). Sedangkan perhatian Pendidikan Kewarganegaraan memberikan konsep dan paradigma baru untuk mempersiapkan warganegara yang memiliki karakteristik warganegara multidimensional (CCE, 1996; Cogan & Derricott 1998; dan A.A.Wahab 2006). Warganegara multidimensional ini mempunyai lima ciri utama yakni: “...*a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfilment of corresponding obligation; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values*” (Cogan & Derricott, 1998: 2-3). Dengan kata lain secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan mengemban tugas untuk membangun lima ciri utama yang dimiliki oleh warganegara yakni: memiliki jatidiri; kebebasan untuk memperoleh hak-hak tertentu; pemenuhan terkait kewajiban-kewajiban; minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan kepemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan disinilah salah satu peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkembangkan kesadaran ekoliterasi dan kesadaran *environment* warganegara.

Bertolak dari latar belakang di atas maka diperlukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Ekoliterasi sebagai upaya merekonstruksi Ekologis Kewarganegaraan.

ECOLITERACY DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Gagasan *ecoliteracy* atau kesadaran terhadap lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh masyarakat dunia. *Ecoliteracy* sebagai paradigma menggagas gerakan kepedulian terhadap lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat (lihat Fritjof Capra, 1995; David W Orr, 1992; Palmer, 2003; dan Michael and Zenobia Barlow, 2005). *Ecoliteracy* berupaya merekonstruksi pemahaman warganegara akan pentingnya kesadaran ekologis global agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan warga dunia dengan kesanggupan bumi dalam menopang kebutuhannya, Capra (1995) menyatakan bahwa:

The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities-communities that are designed in such a way that their ways of life, businesses, economies, physical structures, and technologies do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. The first step in this endeavor is to understand the principles of organization that ecosystems have developed to sustain the web of life. This understanding is what we call ecological literacy.

Dari kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa tantangan besar saat ini adalah membangun dan memelihara masyarakat yang berkelanjutan. Masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga cara hidup, bisnis, ekonomi, struktur fisik, dan teknologi tidak mengganggu kemampuan

alam dalam menopang kehidupan. Langkah pertama dalam upaya ini adalah memahami prinsip-prinsip organisasi dari ekosistem sebagai jaring kehidupan. Pemahaman ini adalah apa yang kita sebut melek ekologi. Masyarakat yang melek ekologi tidak hanya dan menghargai lingkungan alam, tetapi juga menghargai kehidupan itu sendiri.

Salah satu hasil dari *Earth Summit* dari kegiatan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro 3-4 Juni 1992 adalah merekomendasikan untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) pada abad ke-21 melalui penyelenggaraan pendidikan yang diintegrasikan dengan permasalahan lingkungan hidup atau pendidikan berbasis lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Palmer (2003)

one of the key outcomes of conference for educators is the recommendation that environmental and development education should be incorporated as an essential part of learning, within both formal and non-formal education sector.

Pendidikan memang signifikan dalam mengubah mindset dan cara berperilaku seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan menjadi *smart and good*. Termasuk kesadaran ekologi seseorang dapat ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang mengajarkan seseorang untuk menjaga dan memelihara lingkungan melalui berbagai perilaku ramah lingkungan dan memelihara lingkungan melalui berbagai perilaku ramah lingkungan yang akan berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat berkelanjutan.

UNESCO (1975) dalam Palmer (2003, hlm.13) juga merumuskan tujuan pendidikan lingkungan hidup yaitu: (1) Untuk Menumbuhkan kesadaran yang jelas dan kekhawatiran tentang ekonomi, sosial, politik dan ekologi saling ketergantungan di daerah perkotaan dan pedesaan; (2) Untuk memberikan setiap orang kesempatan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan; (3) Untuk membuat pola-pola baru perilaku individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungan. Prakteknya dalam pendidikan lingkungan hidup ini dapat dikembagkan dalam tiga jalur yakni: (1) *Education ABOUT the environment* merupakan pembelajaran tentang materi lingkungan alam sendiri. Pembelajarannya bisa melalui pendekatan *discovery*. Tujuan utamanya adalah sebatas dimensi kognitif atau sekedar mengumpulkan informasi; (2) *Education FROM the environment* adalah pembelajaran yang menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran ini bisa melalui dua cara. Pertama, sebagai media untuk melakukan proses *inquiri* dan *discovery* sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran. Kedua, sebagai sumber materi untuk aktivitas nyata dalam pembelajaran PKn, bahasa, matematika, IPA, IPS dan sebagainya. ; and (3) *Education FOR the environment* adalah pembelajaran yang menggunakan lingkungan sebagai model yang menekankan tentang pengembangan informasi kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tujuan bukan hanya sekedar memperoleh kemahiran pengetahuan dan keterampilan namun memerlukan

pengembangan keterlibatan nilai yang mempengaruhi perilaku. Tujuannya adalah mengembangkan sikap dan tingkat pemahaman agar menerapkan etika lingkungan seseorang.

Sejalan dengan hal itu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mencapai kompetensi kewarganegaraan yaitu: 1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic Skill* (keterampilan kewarganegaraan) adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) kompetensi ini mengisyaratkan pada karakter publik maupun karakter privat yang penting bagi upaya merekonstruksi kewarganegaraan ekologis.

Pemikiran di atas menggambarkan strategis dan pentingnya *ecoliteracy* dalam merekonstruksi kewarganegaraan ekologis maka Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu wahana dalam pendidikan moral dan karakter karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengemban misi nilai dan sikap dalam tiga domain yakni domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik untuk mencapai tujuan intruksional dan tujuan pengiring sekaligus (Budimansyah, 2010:69; Winataputra, 2012:50). Pengembangan nilai/karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dampak dari pembelajaran (*instructional effect*) serta merupakan dampak pengiring (*nurturant effect*).

Operasionalisasi konsep *ecoliteracy* atau pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat kita lakukan dengan menyusun jejaring/keterkaitan

antara *a set of core competence* yang sudah baku dengan Kompetensi Inti dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum 2013 dan indikator pencapaiannya. *The Center for Ecoliteracy* (<http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies>) misalnya telah mengembangkan standar atau struktur kompetensi inti (*a set of core competence*) *ecoliteracy* yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Kompetensi ini terkait dengan domain kognitif (*learning to know*), afektif (*learning to be*), psikomotor (*learning to do*), dan hubungan dengan manusia dan alam sekitar (*learning to live together*). Contoh *a set of core competence* dari *centere for ecoliteracy* bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan *ecoliteracy* peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mata pelajaran PKn di Sekolah Dasar Berdasarkan Kurikulum 2013 misalnya:

Kelas/Semester : VI (Enam)

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) : Memahami pengetahuan actual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.

Kompetensi Dasar :

- 3.1. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya.
- 3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warganegara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.3. Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
- 3.4. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya.

Bertolak dari kurikulum di atas, maka dapat dikembangkan materi Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya tentang memilih makanan yang sehat di kantin sekolah sebagai bentuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis ekoliterasi. Untuk mengetahui kompetensi peserta didik dalam memilih makanan yang sehat melalui Pendidikan Kewarganegaraan, maka *Set of core competency from the Center for Ecoliteracy* dapat diolah seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Keterkaitan Core Competence Ecoliteracy dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn di Sekolah Dasar.

No	<i>Set of core competency from the Center for Ecoliteracy</i>	Indikator Keberhasilan
1.	<i>Head (Cognitive)/kognitif (Civic Knowledge)/Pengetahuan Kewarganegaraan</i>	1) Peserta didik dapat mendeskripsikan contoh makanan yang sehat dan tidak sehat.
	1. <i>Approach Issues and situations from a systems perspective</i>	2) Peserta didik dapat mengidentifikasi indikator makanan yang sehat dan tidak sehat
	2. <i>Understand fundamental ecological principles</i>	3) Peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi makanan yang di jual di kantin sekolah
	3. <i>Think critically, solve problems creatively, and apply knowledge to new situations</i>	4) Peserta didik dapat menjelaskan dampak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat serta dampaknya untuk kesehatan dan lingkungan

<p>4. <i>Envision the long-term consequences of decisions.</i></p>	
<p>2. <i>Heart (Emotional)/Sikap/afektif (Civic Disposition) /Sikap Kewarganegaraan</i></p>	<p>1) Peserta didik memiliki kesadaran untuk tidak mengonsumsi makanan yang tidak sehat</p> <p>2) Peserta didik dapat menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan dengan mengonsumsi makanan yang sehat</p> <p>3) Peserta didik berkomitmen untuk makan pagi di rumah dan membawa bekal makanan yang sehat dari rumah</p> <p>4) Peserta didik menunjukkan sikap tidak membuang kemasan makanan instan</p> <p>5) Peserta didik Komitmen untuk tidak mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan instan yang mengandung pengawet, pemanis, pengembang, dan pewarna yang berbahaya bagi kesehatan.</p>
<p>1. <i>Feel concern, empathy, and respect for other people and living things</i></p> <p>2. <i>See from and appreciate multiple perspective, work with and value others with different backgrounds, motivation, and intentions.</i></p> <p>3. <i>Commit to equity, inclusivity, and respect for all people.</i></p>	
<p>3. <i>Hands (Aktif)/Psikomotorik (Civic Skill)/ Ketrampilan Kewarganegaraan</i></p>	<p>1) Peserta didik dapat mempraktekan cara memilih makanan yang sehat dari bahan makanan lokal yang ada di kantin dan di lingkungan rumah</p> <p>2) Peserta didik dapat membudidayakan tanaman bahan makanan yang sehat.</p> <p>3) Peserta didik dapat memanfaatkan kemasan makanan yang sulit terurai menjadi permainan atau kerajinan tangan.</p> <p>4) Peserta didik dapat menginformasikan manfaat makanan yang sehat dan dampak makanan yang tidak sehat kepada teman-temannya.</p>
<p>1. <i>Create and use tools, objects, and procedures required by sustainable communities</i></p> <p>2. <i>Turn conviction into practical and effective action, and apply ecological knowledge to the practice of ecological design</i></p> <p>3. <i>Assess and adjust uses of energy and resources.</i></p>	

Sumber: Olahan W.S. Rondli: 2016 dari <http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies>

REKONSTRUKSI KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS

Gagasan ekologi kewarganegaraan (*ecological citizenship*) merupakan gagasan yang berkaitan dengan identitas moral atau etika warga negara terhadap lingkungan. Deane Curtin (dalam Isin dan Turner, 2002: 297) bahwa *“The idea of ecological citizenship is promising because it resonates deeply with Western ideas about what it means to lead a full human life”*, bahwa gagasan kewarganegaraan ekologis yang cukup menjanjikan karena beresonansi mendalam dengan ide-ide barat tentang makna untuk menjalani kehidupan manusia secara utuh, juga berpotensi untuk memerintah dalam individualisme korosif yang berhubungan dengan lingkungan dan membentuk keseimbangan kepribadian setiap individu dan masyarakat umum. Kewarganegaraan ekologis membicarakan bagaimana manusia sebagai individu yang memiliki identitas diri (identitas moral) beradaptasi dengan lingkungan komunitas baik dalam kapasitas internal (aktivitas) menerima otoritas dari komunitas ataupun secara eksternal membentuk/terlibat dalam membentuk komunitas konstitutif.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah atau bersih saja, akan tetapi ini sudah masuk pada kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain (Subagyio, 1999:17). Hak orang lain tersebut adalah untuk menikmati dan merasakan keseimbangan alam secara murni. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya merusak saja, sebaiknya dihindari dalam perspektif ini. Oleh karena itu, tindakan suatu kelompok yang hanya ingin menggapai keuntungan pribadi saja sebaiknya juga harus meletakkan rasa toleransi. Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian dari konsekuensi logis dari kita hidup bersama sebagai makhluk

sosial, karena melanggar konsekuensi ini juga berarti melanggar etika berkehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Plato bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu menghargai satu dan lainnya. Demikian juga halnya dengan perspektif lingkungan, hal yang sama juga berlaku di sini.

Berkaitan dengan konsep kesadaran (*awareness*) ini, maka Robbins (2003), pertama-tama menekankan bahwa betapa selama sekitar seratus tahun ini negara-negara industri menyaksikan pertumbuhan kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya yang disertai dengan konsumsi sumber daya alam serta barang-barang lainnya. Tercapainya kemakmuran yang luar biasa itu menimbulkan pengaruh dahsyat terhadap ekosistem. Selanjutnya, Robbins (2003) mensitir bahwa fenomena perubahan yang menjurus ke arah maraknya ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan atau kebodohan tentang adanya kerusakan lingkungan.

Analisis kritis tentang hal di atas, menurut Robbins (2003) yakni, *“The lack of consideration and apathy about environmental problems arises from a disconnect that has developed between humans and the land on which they live”*. Bahwa yang mendasari sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap lingkungan itu muncul dari terpisahnya hubungan hubungan antara manusia dan tanah di mana mereka tinggal. Pendapat Roderick Nash, seperti yang disitir oleh Robbins (2003) menegaskan bahwa pangkal persoalannya *“... which gave man dominion over his environment encouraged arrogance rather than respect,”* yakni karena manusia ditempatkan di atas lingkungannya mendorong terjadinya keangkuhan ketimbang rasa hormat.

Untuk mengatasi masalah lingkungan dewasa ini, Robbins (2003) mengajukan gagasan, yakni : “*The first step in addressing our current environmental problems is to develop an environmentally-conscious society. Education is an important key towards achieving the goal of environmental awareness*”. Bahwa perlunya dikembangkan sebuah masyarakat yang sadar akan lingkungan, dan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut yakni sadar lingkungan. Programnya perlu diperbaharui, dan Robbins (2003) mengajukan pemanfaatan “kelas di alam terbuka” dan dimulai untuk mengajarkan pendidikan lingkungan dengan pendekatan pengalaman langsung, *hand on experience*.

Kesadaran lingkungan beranjak dari pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan alam sebagai sebuah sistem, dan kedudukan manusia yakni sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Landasan etika ini menegaskan perlu ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya, karena kecerdasan ekologis didukung oleh keadaan ekologis pula. Pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan *ekosentrisme* dan bukan pandangan *anthroposentrisme* dalam perspektif etika lingkungan. Keraf (2002:14) menguraikan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, yang jika dikaji lebih jauh juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksud adalah: (a) sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*); (b) prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*); (c) solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*); (d) prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*); (e) prinsip tidak melakukan kerusakan (*no harm*); (f) prinsip hidup sederhana dan selaras dengan

alam; (g) prinsip keadilan; (h) prinsip demokrasi; dan (i) prinsip integritas moral.

SIMPULAN DAN SARAN

Perhatian terhadap kerusakan lingkungan menghasilkan pemikiran terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan pada abad ke-21 melalui penyelenggaraan pendidikan yang diintegrasikan dengan permasalahan lingkungan hidup atau disebut pendidikan berbasis lingkungan hidup. Pelaksanaan pendidikan berbasis lingkungan hidup salah satunya dapat diintegrasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan karena menjadi salah satu wahana dalam pendidikan moral dan karakter serta mengemban misi nilai dan sikap dalam tiga domain yakni domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik untuk mencapai tujuan intruksional dan tujuan pengiring sekaligus, dengan harapan terbentuk kesadaran moral dan etika warganegara terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimasyah, Dasim (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Capra, F. (1995). *The Web of Life*, Harper Collins. Tersedia Online di <http://www.ecoliteracy.org/publications/frijop> (diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 08.58 WIB)
- Cogan, J.J and Ray Derricott (eds) (1998). *Citizenship for The 21 Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Curtin, D. (2002) Ecological Citizenship. Dalam Isin, E.F. dan Turner, B.S.

- (eds). *Handbook of Citizenship Studies*. New Delhi : SAGE Publications.
- Kalidjernih, F.K. (2011). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Keraf, A.S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta : PT Kompas.
- Orr, D.W. (1992). *Ecological Literacy Education The Transition to a Postmodern World*. New York: State University of New York Press.
- Palmer, J.A. (2003). *Environmental Education in the 21 Century*. New York: Routledge
- Palmer, J.A and Neal, P. (2003). *The Handbook of Environmental Education*. New York: Routledge
- Robbins, K. (2003). *Environmental Awareness: Overcoming Ignorance and Apathy by Getting People 'Outside'*. Salt Lake City : Macalester College Environmental Studies Progame.
- Subagyo, P.J. (1999). *Hukum Lingkungan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- The Center for Ecoliteracy. (2011). Core Competencies for Ecoliteracy. Tersedia On Line di <http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies> (diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 08.55 WIB)
- Wahab, A.A. (2006). "Pengembangan konsep dan paradigma pendidikan kewarganegaraan baru Indonesia bagi terbinanya warga negara multidimensional Indonesia", dalam pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Bandung: Lab. PMPKN FPIPS UPI.
- Winataputra, Udin S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksisi)*. Bandung: Widya Aksara Press.